



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PERBENDAHARAAN I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR 2-4 JAKARTA 10710 KOTAK POS 1495
Telepon: (021) 3842234, 3449230 PES.5200 (021) 3450959, 3847068 Faksimile (021) 3846402, 3864776

Nomor : S- **614** /PB/2020 17 Juli 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian
Negara/ Lembaga (K/L) Triwulan III dan IV Tahun 2020 pada Aplikasi
OM-SPAN

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Wakil Kepala Kepolisian RI/Jaksa
Agung Muda Bidang Pembinaan/Deputi Bidang Administrasi/Sekretaris
Kementerian Negara/Lembaga (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 serta implementasi langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka memasuki tatanan normal baru (*new normal*), menjaga tata kelola (*governance*) pelaksanaan anggaran, serta mendorong akselerasi belanja pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, maka Kebijakan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) K/L Tahun 2020 yang sebelumnya "tidak dilakukan penilaian" sebagaimana diatur dalam surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Kebijakan Relaksasi Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 dinyatakan akan "dilakukan penilaian kembali" mulai Triwulan III Tahun 2020.
2. Penerapan kebijakan penilaian kembali IKPA K/L mulai Triwulan III tersebut, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diberlakukan untuk transaksi pengelolaan keuangan mulai tanggal 1 Juli 2020, yakni untuk bulan Juli sampai dengan Desember, dan tidak bersifat akumulatif dari bulan Januari-Juni;
 - b. Batas *cut off* update Halaman III DIPA untuk periode Triwulan III dilakukan perpanjangan pengajuan revisi administrasi Halaman III DIPA sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020.
 - c. Kebijakan relaksasi penilaian IKPA sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
3. Selanjutnya, dalam rangka persiapan penilaian kembali IKPA dimaksud, diminta agar K/L melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - a. Menyelesaikan revisi anggaran sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 - b. Mereviu kembali rencana kegiatan sesuai dengan hasil revisi anggaran Perpres 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 - c. Mereviu rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA dengan mengacu pada jadwal pencairan dana yang ditetapkan; serta
 - d. Menginventarisasi pekerjaan kontraktual, melakukan percepatan pengadaan barang/jasa, melakukan pendaftaran data kontrak, dan percepatan pembayaran sesuai prestasi pekerjaan.
4. Terhadap perubahan kebijakan penilaian kembali IKPA K/L dan langkah-langkah persiapan sebagaimana tersebut di atas, diminta agar dapat disampaikan kepada seluruh Satker di lingkup K/L masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Arudin Hadiyanto

Tembusan:
Menteri Keuangan Republik Indonesia

LAMPIRAN
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : S- 614 /PB/2020
Tanggal : 17 Juli 2020

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Wakil Kepala Kepolisian RI/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan/Deputi Bidang Administrasi/Sekretaris Kementerian Negara/Lembaga

NO.	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
1	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)
2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
3	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
4	MAHKAMAH AGUNG
5	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
6	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
8	KEMENTERIAN LUAR NEGERI
9	KEMENTERIAN PERTAHANAN
10	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
11	KEMENTERIAN KEUANGAN
12	KEMENTERIAN PERTANIAN
13	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
14	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
15	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
16	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
17	KEMENTERIAN KESEHATAN
18	KEMENTERIAN AGAMA
19	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
20	KEMENTERIAN SOSIAL
21	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
22	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
23	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
24	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
25	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
26	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
27	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
28	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
29	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)
30	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
31	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
32	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
33	BADAN INTELIJEN NEGARA
34	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
35	DEWAN KETAHANAN NASIONAL
36	BADAN PUSAT STATISTIK
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS
38	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
39	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
40	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
41	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO.	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
42	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
43	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
44	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
45	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
46	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
47	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
48	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
49	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
50	KOMISI PEMILIHAN UMUM
51	MAHKAMAH KONSTITUSI RI
52	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
53	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)
54	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)
55	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
56	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)
57	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
58	BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)
59	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)
60	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
61	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
62	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
63	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
64	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
65	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
66	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
67	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
68	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
69	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
70	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)
71	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
72	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
73	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
74	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)
75	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
76	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)
77	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)
78	SEKRETARIAT KABINET
79	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
80	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
81	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
82	BADAN KEAMANAN LAUT
83	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
84	BADAN EKONOMI KREATIF
85	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)